

**TERORISME, NEGARA, DAN POLITIK:
Kebijakan dan Sikap Ambivalen Israel Terhadap Aksi Teror**



**Oleh:
Muhammad Abdillah Ihsan
NIM: 17200010078**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Timur Tengah**

**YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Abdillah Ihsan, S. Pd.
NIM : 17200010078
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 April 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd.

NIM: 17200010078

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Abdillah Ihsan, S. Pd.
NIM : 17200010078
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 April 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd.

NIM: 17200010078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : TERORISME, NEGARA, DAN POLITIK: KEBIJAKAN
DAN SIKAP AMBIVALEN ISRAEL TERHADAP AKSI
TEROR

Nama : Muhammad Abdillah Ihasn

NIM : 17200010078

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Tanggal Ujian : 23 April 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister of Art
(M.A.)

Yogyakarta, 10 Mei 2019

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : TERORISME, NEGARA, DAN POLITIK:
: KEBIJAKAN DAN SIKAP AMBIVALEN ISRAEL
: TERHADAP AKSI TEROR

Nama : Muhammad Abdillah Ihasn


NIM : 17200010078


Jenjang : Magister (S2)

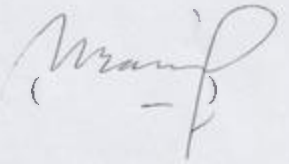
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Prof. Dr. H.M. Abdul Karim, MA., MA ()

Pembimbing/Penguji : Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil.,
Ph.D. ()

Penguji : Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D. ()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 April 2019

Waktu : 13.00 WIB

Hasil/Nilai : 98 / A

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

TERORISME, NEGARA, DAN POLITIK
Kebijakan dan Sikap Ambivalen Israel Terhadap Aksi Teror

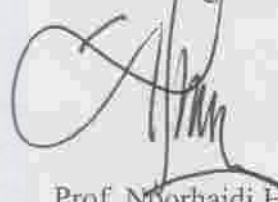
Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd.
NIM : 17200010078
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 April 2019
Pembimbing



Prof. Noorhaidi Hasan, Ph.D.

ABSTRAK

Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd. (17200010078). TERORISME, NEGARA, DAN POLITIK Kebijakan dan Sikap Ambivalen Israel Terhadap Aksi Teror. Tesis, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Penelitian ini berawal dari keresahan akan bervariasinya respons Israel terhadap beragam aksi teror. Latar belakang masalah dalam penelitian ini berangkat dari kontradiksi kebijakan dan sikap Israel dalam menyikapi terorisme. Pertanyaan riset dalam penelitian ini antara lain Bagaimana Israel mendefinisikan terorisme? Bagaimana kebijakan Israel dalam menyikapi terorisme? Mengapa terdapat perbedaan kebijakan terhadap terorisme? Dan apa tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan yang diterapkan? Tujuan penelitian untuk menemukan kemungkinan alternatif hubungan antara Israel dan terorisme dan diharapkan dapat memberikan pandangan berbeda dalam melihat terorisme. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pandangan Konstruktivisme Alexander Wendt dalam melihat permasalahan yang diangkat. Penelitian ini berakhir dengan kesimpulan bahwa terorisme didefinisikan oleh Israel secara subjektif dan Israel menerapkan kebijakan dan sikap yang ambivalen dalam menanggapinya. Ambivalensi ini disebabkan perbedaan aktor, objek, dan konteks teror yang dihadapi. Ambivalensi ini merujuk pada unsur identitas dan kepentingan yang melekat pada negara dan entitas teroris. Kepentingan nasional Israel menjadi panduan bagi kedua aktor untuk menentukan identitas dan tindakan.

Kata kunci : Terorisme, Kebijakan, Israel.

ABSTRACT

This research came up from the anxiety about the Israel response variety to various acts of terrors. The background of this study departs from the contradiction of Israeli policies and responses in addressing terrorism. Research questions of this study include: How does Israel define terrorism? What is Israeli policy in dealing with terrorism? Why are there policies differences against terrorism? And what are the objectives to be achieved through the policies implemented? The purpose of this study is to find alternative possibilities of relationship between Israel and terrorism and is expected to be able to give a different view about terrorism. This study is qualitative research and used Alexander Wendt's Constructivism view to see the problem. This study concludes that terrorism is defined by Israel subjectively and that Israel implements ambivalent policies and manners. This ambivalence is caused by differences in the actors, objects, and contexts of terror faced. This ambivalence refers to the identity and interests of the state and terrorist entities. Israel's national interests serve as a guide for both actors to determine identity and action.

Keywords: Terrorism, Policy, Israel.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Puji syukur kehadirat Allah swt. yang atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “TERORISME, NEGARA, DAN POLITIK Kebijakan dan Sikap Ambivalen Israel Terhadap Aksi Teror”.

Saya menyadari penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag, M.A, M. Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan saran kepada saya dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Ro’fah, S. Ag, BSW, MA, Ph.D., selaku Koordinator Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ibnu Burdah, MA., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan semasa perkuliahan.

5. Prof. Magdy Bahig Behman, selaku dosen dengan kelas terbanyak yang telah memberikan banyak pembelajaran dan perspektif alternatif.
6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
7. Para “guys” di KTT 2017, terima kasih untuk diskusi-diskusi dan pertemanan akademisnya.

Saya berharap semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dalam bidang Kajian Timur Tengah, baik yang sifatnya teoritis maupun praktis. Akhirnya saya menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat saya harapkan demi perbaikan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 04 April 2019

Muhammad Abdillah Ihsan, S.Pd.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. *Al-Marhumah* Mama, Hj. Siti Agustinah dan *Al-Marhum* Bapa, H. Irhamni, S.Sos.
2. Mama Acil, Hj. Fatmawati, S.Pd. dan Mama, Hj. Normiati, S.Pd.
3. Guru-guru, ustadz-ustadz, dan dosen-dosen saya.
4. Para senior di Himpunan Mahasiswa Islam.
5. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Antasari Banjarmasin.
6. *Mi Amor*, Helda Wati, S.Pd.
7. Peneliti dan pegiat Kajian Timur Tengah.
8. Palestinian, orang-orang kuat dan sabar.
9. Israeli, orang-orang yang layak hidup damai.

*“One person’s terrorist
is
another person’s freedom fighter”*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoretis.....	21
F. Metodologi Penelitian	39
G. Sistematika Pembahasan	40
BAB II :	
TERORISME : PERSOALAN DEFINISI DAN POSISI ISRAEL DI DALAMNYA.....	42
A. Terorisme dari Sudut Pandang Israel.....	46
B. Pendefinisian Terorisme Secara Umum.....	56

BAB III : SIKAP DAN KEBIJAKAN ISRAEL TERHADAP TERORISME.....	62
A. Respon dan Kebijakan : Sebuah Ambivalensi.....	62
B. Interpretasi terhadap Sikap Ambivalen Israel	85
 BAB IV: PREFERENSI DAN TUJUAN.....	 97
A. Kepentingan Nasional	97
B. Kepentingan Bersama dalam Kacamata Identitas Kolektif	112
 BAB V: PENUTUP	 115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
 DAFTAR PUSTAKA.....	 119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme telah dianggap sebagai fenomena global yang mengancam tatanan negara-negara di dunia. Terorisme diasumsikan tidak hanya mengancam perdamaian dan keamanan, tetapi juga masuk ke dalam ranah ekonomi, sosial, dan eksistensi negara. Negara yang tidak mampu menanggulangi persoalan terorisme akan dianggap sebagai negara gagal.¹ Perang Global Melawan Terorisme yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS) telah digaungkan hampir dua dekade silam. Hanya ada dua pilihan bagi setiap negara dalam posisi melawan terorisme sebagaimana yang dinyatakan Presiden George W. Bush; *either you are with us, or against us* yang menjebak banyak negara dalam posisi biner. Tidak ada ruang untuk netralitas dalam perang melawan terorisme.²

Perjalanan waktu telah membuka banyak perdebatan dari para kritikus politik yang meragukan kapabilitas dan efektivitas perang melawan terorisme. Dalam banyak kasus, perang ini telah banyak mengebiri hak asasi dan melahirkan konflik kepentingan dalam skala global.

Kata “perang” dalam hal ini sangat tidak relevan dengan posisi terorisme itu sendiri. Perang melawan terorisme menyiratkan solusi militer sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam hal tertentu militer mungkin

¹ Jajang Jahroni, ed., *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*, Edisi Pertama. (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016), xv.

² “CNN.Com - ‘You Are Either with Us or against Us’ - November 6, 2001,” accessed March 24, 2019, <http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/>.

diperlukan sebagai *back up*, tetapi urusan paling krusial yang harus diselesaikan adalah dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi sumber terorisme. Apa yang oleh Barat disebut sebagai terorisme adalah taktik dari mereka yang merasa tertindas, putus asa atau tertipu, dan tidak memiliki cara praktis lain untuk berjuang dengan cara yang sah.³ Menurut pandangan ini, kata “perang” dalam Perang Melawan Terorisme dianggap tidak tepat sasaran, tidak mewakili apapun dan merupakan strategi yang keliru untuk menanggulangi terorisme.

Perang melawan terorisme dalam beberapa kesempatan juga dapat menjelma menjadi tindakan teror itu sendiri. Dalam pengantar bukunya Noam Chomsky mencatat pengalaman yang tidak begitu berhasil telah ditorehkan AS dalam kampanye perang melawan terornya di Kuba, Angola, dan Nikaragua yang pada akhirnya menempatkan AS sebagai aktor teror itu sendiri.⁴ AS memiliki catatan panjang dalam mendukung teroris dan menggunakan taktik teroris, slogan perang melawan terorisme pada gilirannya hanya membuat AS terlihat sebagai negara munafik.⁵

Pengalaman sebagai negara teror tidak hanya dialami oleh AS, negara-negara lain seperti Prancis, Jerman, Cina, Iran dan lainnya juga pernah mengalami fase yang sama. Bahkan mungkin juga Indonesia dan negara yang menjadi fokus pembahasan di sini, Israel.

³ “The Seattle Times: Nation & World: ‘War on Terror’ Difficult to Define,” last modified January 14, 2009, accessed March 24, 2019, https://web.archive.org/web/20090114085106/http://seattletimes.nwsources.com/html/nationworld/2002023596_russanal02.html.

⁴ Noam Chomsky, *Pirates and Emperor*, trans. Eka Saputra and Khanifah (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2017), vii-xiii.

⁵ William E. Odom, “American Hegemony: How to Use It, How to Lose It,” *American Philosophical Society Vol. 151*, no. 4 (December 2007), 404–411.

Pengalaman yang berkaitan dengan teror pernah dialami oleh Indonesia bahkan sejak awal berdirinya negara. Masa-masa setelah 17 Agustus 1945 yang mana euforia kemerdekaan telah menggelayuti banyak orang Indonesia sebagai sebuah hasil perjuangan yang sangat manis. Namun bagi sebagian kalangan, hal ini diiringi dengan keinginan balas dendam kepada penjajah, khususnya Belanda dan koleganya. Periode ini dikenal dengan Masa Perjuangan Bersiap, yang mana ditandai dengan maraknya tindakan kriminal dan kekerasan terhadap orang Belanda dan Indo-Belanda hampir di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Target serangan tidak hanya orang-orang Belanda dan Indo-Belanda tetapi juga dari kalangan pribumi sendiri seperti etnis Ambon, Minahasa, Manado, dan keturunan Tionghoa yang secara kebetulan sebelumnya mendapat perlakuan relatif lebih baik dari Belanda. Para korban mengalami penangkapan, penjarahan, perkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan keji yang tidak pandang umur dan jenis kelamin.⁶

Aksi teror juga dapat ditemukan di Israel sejak masa perjuangan kemerdekaannya. Kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 dapat dideklarasikan sedikitnya berkat kontribusi dari kelompok teroris Irgun Zvai Leumi⁷ dan Lohamei Herut Israel (LEHI)/*The Stern Gang* dalam aksi teror terhadap warga Arab-Palestina.⁸ Angkatan bersenjata Israel, *Israel Defense Force* (IDF) sendiri dibentuk dari gabungan banyak paramiliter Yahudi seperti Haganah, Palmach, dan

⁶ Petrik Matanasi, "Masa Bersiap Pasca-Merdeka: Masa Ngeri Tak Ada Sedapnya," *tirto.id*, accessed March 24, 2019, <https://tirto.id/masa-bersiap-pasca-merdeka-masa-ngeri-tak-ada-sedapnya-cGog>.

⁷ Tomis Kapitan, "Terrorism in the Arab-Israeli Conflict," in *Terrorism*, ed. Igor Primoratz (London: Palgrave Macmillan UK, 2004), 175–191.

⁸ Benny Morris, *1948: A History of the First Arab-Israeli War*. (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 37–81.

tentu saja termasuk di dalamnya Irgun dan LEHI.⁹ Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa beberapa Perdana Menteri (PM) Israel di masa selanjutnya merupakan pentolan dan pemimpin gerakan teror Irgun dan LEHI, mereka adalah Menachem Begin (menjabat 1977-1983) dan Yitzhak Shamir (menjabat 1983-1984 dan 1986-1992), keduanya terjun di dunia politik melalui partai Herut dan kemudian Likud, partai berideologi Zionisme Revisionis, ideologi yang sama dengan ideologi Irgun dan LEHI di masa lalu.¹⁰

Seperti banyak negara yang merdeka pasca berakhirnya Perang Dunia II, Israel juga melalui dinamika perjuangan yang berdarah dan menguras air mata. Perjuangan kemerdekaan ini merupakan sebuah manifestasi dari tujuan Organisasi Zionis Internasional untuk mendirikan negara Yahudi sebagai perlindungan bagi masyarakat dan identitas Yahudi yang terdiaspora di berbagai negara dan mendapatkan tindakan diskriminatif yang sangat keras. Tujuan ini ditetapkan dalam kongres zionis internasional pertama yang dilaksanakan di Basel, Swiss pada tahun 1897 dan semangatnya diambil dari buku *Der Judenstaat* karya Theodore Herzl.¹¹

Meski kelahiran Israel memiliki kaitan dengan aksi-aksi teror kelompok paramiliter Yahudi, negara modern Israel memiliki permusuhan yang sangat keras dengan kelompok-kelompok radikal yang dicap sebagai kelompok teroris, terutama dari gerilyawan Palestina yang diwakili oleh *Harakat al-Muqawamah*

⁹ Adam Couture, "Menachem Begin's Irgun and Zionist Revisionism: 1944-1948" (University of Wisconsin - Eau Claire, t.t.), 9.

¹⁰ Brandon Sellers, "The Irgun Zvai Leumi: From Terrorists to Politicians," *Schemata* (2013), 1-13.

¹¹ Adian Husaini, *Pragmatisme Dalam Politik Zionis Israel* (Jakarta: Khairul Bayaan, 2004), 10.

al-Islamiyyah (HAMAS) dan Lebanon yang diwakili oleh Hezbollah. Perjuangan rakyat Palestina atas hak tanah mereka berhadapan langsung dengan salah satu kekuatan militer dan wacana terkuat di dunia di mana AS ada di belakangnya.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena kontroversial Israel dalam menyikapi terorisme. Dalam melihat terorisme, Israel memiliki dua sikap yang kontradiktif satu sama lain. Di masa awal berdiri negara, Israel melihat dan memposisikan tindakan teror dan kelompok teroris sebagai sebuah entitas yang menguntungkan dan patut dihargai. Sebagai contoh, Irgun sebagai sebuah organisasi teroris Yahudi kemudian dapat bertransformasi menjadi partai politik penting di Israel bernama Herut - cikal bakal partai Likud - dan pada gilirannya mendapat keberterimaan cukup memuaskan di tengah masyarakat serta mampu menanamkan pengaruh besar di Knesset, parlemen Israel. Likud sebagai partai politik berkuasa hari ini juga merupakan transformasi berikutnya dari entitas ini.¹² Pada era stabilnya Israel sebagai sebuah negara-bangsa, terorisme dilihat sebagai sebuah ancaman bagi keamanan dan keberlangsungan negara, terlebih teror-teror yang dilakukan oleh kelompok orang-orang Palestina atau simpatisannya. Kampanye Perang Melawan Teror yang digaungkan Pemerintah AS pasca tragedi 9/11 semakin memberikan pondasi kuat bagi Israel sebagai sekutu loyal AS dalam menerapkan kebijakan-kebijakan politik menentang tindakan teror. Wacana *counter-terrorism* pun semakin kuat bergema seantero dunia dengan berbagai implementasinya tersendiri.

¹² Sellers, "The Irgun Zvai Leumi: From Terrorists to Politicians."

Penelitian ini berupaya melaporkan penyebab dan preferensi kontradiksi sikap Israel terhadap tindakan teror tersebut melalui literatur-literatur yang telah ada. Mengenai persoalan ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang saya rujuk sebagai kerangka untuk melihat konteks ini secara terstruktur. Beberapa penelitian terdahulu ini juga memunculkan signifikansi perbedaan dengan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini antara lain Bagaimana Israel mendefinisikan terorisme? Bagaimana kebijakan Israel dalam menyikapi terorisme? Mengapa terdapat perbedaan kebijakan terhadap terorisme? dan apa tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan yang diterapkan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kemungkinan alternatif hubungan antara Israel dan terorisme. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi berbagai ekspresi dan respon terhadap terorisme yang dilakukan Israel serta menelisik faktor-faktor determinan yang mempengaruhi terbentuknya ekspresi dan respon Israel terhadap terorisme. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan berbeda dalam melihat terorisme bagi satu aktor

tertentu. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih perspektif bagi permasalahan sosial-politik dengan tidak melihatnya hanya dalam kacamata hitam-putih. Penelitian ini berupa penelitian pustaka yang memfokuskan pencarian data melalui literatur-literatur yang sudah ada.

D. Kajian Pustaka

Terorisme telah menjadi isu utama baik dalam ranah kajian akademik maupun politik. Terorisme telah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat dunia, ia telah menjadi musuh bersama setiap orang yang mendasarkan kepercayaannya pada upaya perdamaian. Telah banyak perspektif dan analisis terkait dengan permasalahan terorisme yang membawa isu ini menjadi suatu segmen yang tidak mudah dipecahkan. Lizardo berpendapat definisi terorisme selama ini terlalu spesifik atau terlalu kabur. Ia menggunakan pendekatan global dari hubungan internasional dan teori-teori sistem dunia untuk mengusulkan definisi terorisme dengan berkonsentrasi pada aktor-aktor teroris, bukan pada perilaku teroris. Ia meneliti karakteristik terorisme dengan membandingkannya dengan bentuk-bentuk kekerasan lain dalam sistem internasional.¹³ Definisi terorisme sulit untuk ditetapkan secara gamblang karena ia merupakan persoalan moral. Perbedaan pandangan terhadap kasus-kasus terorisme membagi antara aksi-aksi yang dapat dimaklumi dan yang tidak. Hal ini juga yang menyebabkan pandangan terhadap terorisme menjadi sangat subyektif.

¹³ Omar Lizardo, "Defining And Theorizing Terrorism: A Global Actor-Centered Approach," *Journal of World-Systems Research Vol. XIV*, no. 2 (2008), 91–118.

Untuk mencapai tujuan politik terkadang para politikus dapat saja menggunakan berbagai macam cara yang mungkin dilakukan. Hal demikian juga berlaku bagi kelompok teroris. Gould dan Klor mempertanyakan apakah terorisme merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan politik. Keduanya mengeksplorasi varian geografis dalam serangan teror di Israel dari 1988 hingga 2006 yang menunjukkan bahwa serangan teror lokal memberikan dampak diterimanya konsesi teritorial. Namun, di sisi lain, serangan teror di luar batas tertentu juga menyebabkan sikap non-akomodatif. Selain itu, teror juga mendorong meningkatnya dukungan terhadap partai-partai sayap kanan, karena partai-partai ini menyesuaikan diri menjadi lebih “kiri” sebagai respon terhadap teror. Oleh karena itu, terorisme tampaknya menjadi strategi yang efektif dalam mengubah seluruh lanskap politik.¹⁴

Baik teror yang dilakukan oleh sekelompok kecil teroris lokal ataupun kelompok besar berskala internasional, terorisme selalu meninggalkan pekerjaan rumah di negara yang menjadi target terornya, terlebih jika teror itu dilakukan oleh negara itu sendiri. Trapp menegaskan negara yang disponsori atau didukung terorisme telah lama menjadi fitur hubungan internasional modern, tetapi tanggung jawab terhadap hal tersebut jarang sekali disinggung. Salah satu alasannya adalah ketergantungan masyarakat internasional pada paradigma keamanan dalam menanggapi keterlibatan negara dalam terorisme selama beberapa dekade terakhir. Tujuan dari tulisan Trapp ini adalah untuk menguji respon alternatif terhadap terorisme negara berdasarkan tanggung jawab hukum

¹⁴ Eric D. Gould and Esteban F. Klor, “Does Terrorism Work?,” *Journal of World-Systems Research*, Vol. XIV, no. 2 (2009), 91–118.

yang ditentukan secara konstitusional dan tidak bergantung pada Pasal 51 Piagam PBB berkaitan dengan hak pembelaan diri terhadap suatu serangan bersenjata dalam kaitannya dengan peran Dewan Keamanan PBB. Ia meneliti kemungkinan dasar yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam kasus-kasus terorisme negara dan berpendapat bahwa rangkaian konvensi penindasan terorisme juga dapat menjadi sarana untuk menentukan tanggung jawab negara terhadap terorisme di hadapan Mahkamah Internasional.¹⁵ Shehata menulis tentang terorisme dan negara Islam, yang mana sejak tumbuh kembangnya banyak negara muslim, dunia dihadapkan pada organisasi teroris dengan model operasional, ruang lingkup, dan kekuatan keuangan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Tema terorisme yang disponsori oleh negara muncul kembali dengan mempertimbangkan kemungkinan korelasinya dengan dominasi ISIS yang sulit dijelaskan.¹⁶

Diskursus tentang terorisme tidak dapat dikaji sebagai sebuah fenomena tunggal. Selalu ada beberapa hal lainnya yang mengiringi dan mungkin menjadi faktor yang signifikan bagi keberlangsungan aksi teror. Couto menulis makalah dengan meneliti dan menjajarkan diskursus tentang terorisme, kekerasan, dan kepemimpinan politik. Ia menyajikan generalisasi tentang terorisme, politik, dan kekerasan berdasarkan teori Max Weber dan Hannah Arendt. Kontras tajam yang ditarik dari teori-teori ini termasuk *power* sebagai kekuatan tanpa kekerasan (Arendt) dihadapkan dengan *power* yang memiliki ketergantungan-kekerasan

¹⁵ Kimberley N. Trapp, "Holding States Responsible for Terrorism Before the International Court of Justice," *Journal of International Dispute Settlement Vol. III*, no. 2 (2012), 279–298.

¹⁶ Sherif Sheheta, "Threats of Modern Terrorist Organizations and State Sponsored Terrorism - The Case of Islamic State," *Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje*, no. 19 (2015), 216–233.

(Weber) dan usaha untuk melegitimasi agen yang berbeda (negara dan individu) serta terorisme oleh, untuk, dan melawan negara. Pembingkai *power* ini mengarah pada penilaian kurangnya *power* di mana ada kekerasan, dan kehadiran *power* di mana tindakan tanpa kekerasan dapat disaksikan. Penyelidikannya terhadap kekerasan politik dan kriminal menimbulkan pertanyaan tentang kekerasan yang disengaja, kekerasan tidak langsung dan terstruktur yang memiliki konsekuensi politik, dan hubungannya dengan terorisme. Konteks ini memperluas penerapan terorisme dengan memasukkan kekerasan struktural tidak langsung dengan menunjukkan hubungannya dengan kekerasan langsung. Terorisme memiliki banyak bentuk karena banyaknya aktor yang menjalankannya. Untuk mensintesis hasil dari garis-garis penalaran ini mengarah pada kesepakatan dengan implikasi yang cukup besar terhadap politik dan kepemimpinan politik. Politik terorisme menawarkan pendekatan kontra-terorisme terpusat: depolitisasi kekerasan teroris dan menggunakan otoritas dan kekuatan negara untuk melembagakannya sebagai tindak kekerasan kriminal. Dengan kata lain berarti juga mempolitikasi bentuk-bentuk kekerasan lain.¹⁷

Aksi teror dalam beberapa kasus diidentifikasi terafiliasi dengan sebuah kelompok keyakinan atau sekte dalam sebuah komunitas masyarakat. Naharong menjabarkan tentang Peristiwa 9/11 yang menarik perhatian para ilmuwan, wartawan, dan pengambil kebijakan mengenai peranan agama dalam mendorong tindakan terorisme. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa agama tidak memiliki hubungan dengan terorisme. Mereka mengatakan bahwa agama tidak dapat

¹⁷ Richard A Couto, "The Politics of Terrorism: Power, Legitimacy, and Violence," *Toward Development of Politics and the Political Vol. 6*, no. 1 (March 2010), 63–81.

dipersalahkan dan hanya sebagai korban dari para aktivis politik yang tidak bertanggungjawab. Sebagian lagi berpendapat bahwa agama mampu mendorong timbulnya tindakan-tindakan terorisme. Melalui tulisannya ini Naharong mencoba mengelaborasi konsep terorisme keagamaan menurut beberapa ahli.¹⁸

Ranstorp membahas peningkatan terorisme dengan motif agama antara 1960-1990 dan mengidentifikasi mekanisme pemicu yang membawa kekerasan keluar dari ajaran agama. Pertumbuhan terorisme agama menunjukkan transformasi terorisme kontemporer menjadi metode peperangan dan evolusi taktik dan teknik. Evolusi terorisme agama tidak terjadi dalam ruang hampa, hampir seluruhnya tengah mengalami rasa krisis yang serius, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, psikologis, dan spiritual serta diperparah oleh kekacauan politik, ekonomi, dan sosial. serta ancaman sekularisasi. Di sisi lain, terorisme agama menawarkan banyak harapan bagi konstituen yang tidak sabar. Mekanisme pelaksanaan aksi terorisme agama, dalam hal intensitas, metode, dan waktu, dikontrol ketat oleh puncak hirarki yang biasanya adalah seorang pemuka agama. Narasi yang mereka buat dipengaruhi oleh warisan penindasan politik, ketidaksetaraan ekonomi atau pergolakan sosial, dan dapat diperparah oleh perselisihan etnis dan militer secara historis. Teroris agama tidak secara khusus melakukan inventarisasi dalam persenjataan dan hanya mengandalkan bom dan peluru tradisional. Tapi menunjukkan banyak kecerdikan dalam taktik yang digunakan seperti pemilihan cara, metode dan waktu kekerasan untuk menghasilkan efek maksimal. Mereka memanfaatkan gagasan kemartiran dan

¹⁸ Abdul Muis Naharong, "Terorisme Atas Nama Agama," *Refleksi Vol. 3*, no. 5 (October 2013), 593–622.

pengorbanan diri melalui pemboman bunuh diri. Target mereka hampir selalu simbolis dan dipilih dengan cermat untuk menyebabkan trauma psikologis maksimum bagi musuh dan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompoknya. Waktu pelaksanaan dipilih dengan cermat agar bertepatan dengan persyaratan teologis seperti pada hari libur keagamaan dan saat-saat sakral lainnya.¹⁹

Membicarakan Israel, terlebih dalam kaitannya dengan fenomena terorisme tentu akan membawa pada pembahasan mengenai sebuah gerakan yang menjadi pondasi dan cikal-bakal berdirinya negara Israel. Gerakan tersebut adalah Zionisme. Saude menulis tentang Zionisme yang menurutnya merupakan sebuah gerakan politik yang didirikan berdasarkan doktrin Judaisme. Misi yang paling menonjol dari gerakan ini adalah mendirikan Negara Israel yang merdeka. Orang-orang Yahudi mengklaim diri mereka sebagai orang-orang terpilih. Selain itu, mereka mengklaim bahwa Israel adalah tanah suci yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu, mereka terus memerangi orang-orang Palestina untuk merebut tanah suci yang dijanjikan.²⁰ Satrianingsih dan Abidin menulis artikel yang bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah zionisme dan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Tulisannya mempertanyakan bagaimana sejarah Zionisme dan bagaimana proses berdirinya negara Israel dan pada akhirnya menemukan bahwa Zionisme merupakan keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka akan memiliki negara-bangsa sendiri secara independen yang dengan negara itu gerakan zionisme mendapatkan keleluasaan dalam menyusun strategi dan agenda-

¹⁹ Magnus Ranstorp, "Terrorism in the Name of Religion," *Journal of International Affairs* Vol. 50, no. 1 (Summer 1996), 41–63.

²⁰ Saude, "Zionisme Dan Berdirinya Negara Israel," *Jurnal Hunafa* Vol. 3, no. 2 (June 2006), 169–180.

agenda untuk menguasai dunia. Keberhasilan proyek zionisme ini dapat diwujudkan dengan kuatnya lobi internasional yang tepat.²¹

Mayamey menulis tentang diskusi dan wacana sejarawan baru yang menunjukkan Zionisme sebagai gerakan kolonial yang agresif dalam ambisinya untuk membangun rumah Yahudi di Palestina dan mengabaikan mayoritas penduduk Arab. Zionis menjalankan rencana untuk melaksanakan kebijakan untuk pengalihan populasi Arab dan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Zionis melakukannya dengan secara paksa mengusir mayoritas orang Arab Palestina di seluruh perbatasan yang ditentukan PBB dan mengambil alih daerah-daerah yang tidak dialokasikan untuk Negara Israel, yaitu negara Palestina. Pandangan ini membantah klaim Zionis yang menempatkan orang-orang Yahudi sebagai “korban” secara tradisional dan mendukung klaim sejarawan baru bahwa Zionisme adalah perencana dan penyebab eksodus Palestina tahun 1948. Orang-orang Arab Palestina kehilangan tanah leluhur, rumah, bisnis, pekerjaan, keluarga dan bahkan nyawa. Bagi mereka yang selamat dari eksodus, PBB berusaha mencari jalan untuk mengembalikan hak mereka dengan mengeluarkan Resolusi PBB Nomor 194 berkaitan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk merdeka dan berdaulat, dan hak untuk kembali ke rumah dan harta benda. Meski demikian, Israel terus melanggar resolusi dengan konsekuensi yang sangat kecil. Di akhir tulisannya Mayamey mencatat jika ada perdamaian antara Israel dan Palestina suatu hari nanti, maka Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas

²¹ Andi Satrianingsih and Zaenal Abidin, “Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel,” *Jurnal Adabiyah* Vol. 16, no. 2 (2016), 172–185.

kekejaman yang dilakukan terhadap Arab Palestina pada tahun 1948 dan harus memberikan kompensasi kepada Palestina atas kehilangan yang mereka alami.²²

Brandon Sellers menulis tentang organisasi teroris Zionis-Yahudi yang memiliki peran cukup penting bagi Israel baik masa-masa pra maupun pasca deklarasi kemerdekaannya. Irgun Zvai Leumi adalah organisasi teroris Yahudi yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik. Kelompok ini didirikan pada tahun 1931 di bawah pimpinan Ze'ev Jabotinsky berdasarkan doktrin Zionis Revisionis - sebuah ideologi yang menyerukan pendirian negara Yahudi mencapai sungai Yordan di kedua ujungnya - dengan menggalakkan pergerakan tanpa kekerasan terhadap musuh-musuh Inggris dan Arabnya. Pada 1939, Irgun memulai tindakan kekerasan dan secara resmi dapat disebut sebagai organisasi teroris. Tujuan utama gerakan ini adalah mendirikan negara Yahudi sebagaimana terdapat dalam doktrin Jabotinsky. Dengan demikian, organisasi ini tidak mengakui pembagian Palestina dan bersikeras bahwa Negara Yahudi Israel akan mencakup keseluruhan wilayah bekas mandat Palestina dan Kerajaan Trans-Jordan. Strategi dan taktik Irgun selama tahun 1948 terdiri dari serangan teroris di tempat-tempat persinggahan Inggris dan Arab karena mereka dengan keras menentang pengaruh Inggris dan kehadiran Arab di Palestina. Pergeseran strategi Irgun bukan dikarenakan kehabisan dukungan atau pendanaan. Perubahan strateginya lebih disebabkan kesadaran akan kebutuhan untuk menggunakan strategi yang lebih demokratis tanpa kekerasan. Hal ini secara rasional dapat

²² Babak Mayamey, "Zionism A Critical Account 1897-1948. The Development of Israel and the Exodus of Palestine from A 'New Historian' Perspective," *POLIS Journal Vol. 4* (Winter 2010), 1-34.

dimengerti karena tujuan utama mereka telah terpenuhi dengan dideklarasikannya negara Israel. Irgun secara khusus mengubah diri menjadi gerakan politik bernama Herut dibawah kepemimpinan Menachem Begin. Kelompok ini kemudian menjadi sebuah kelompok besar di Knesset, parlemen Israel. Herut memiliki agenda politik yang tetap konsisten dengan tujuan Irgun yaitu memperluas wilayah negara Yahudi. Dalam dunia perpolitikan Herut memiliki hubungan dengan partai-partai politik lain, seperti menjalin koalisi dengan Gahal pada periode tertentu dan membentuk Likud sebagai kelanjutan pembawa misi Zionisme Revisionis Jabotinsky. Warisan Irgun tetap hidup melalui karier politik orang-orang seperti Menachem Begin, Yitzhak Shamir, dan Yaakov Meridor. Menachem Begin dan Yitzhak Shamir secara efektif menciptakan basis Zionis Revisionis melalui terorisme dan kemudian dengan cara yang sangat demokratis, memantapkan diri mereka sebagai pemimpin komunitas dan mendapatkan rasa hormat dari banyak orang. Yaakov Meridor juga berubah dari pemimpin teroris terkemuka menjadi politisi di Israel. Selain Irgun juga terdapat kelompok sempalan LEHI yang juga dikategorikan sebagai organisasi teroris Yahudi. Anggota terkemuka dari kedua kelompok ini menolak untuk diintegrasikan ke dalam Zahal, tentara resmi Israel. Keduanya terlibat dalam teror pembantaian di Deir Yassin pada tanggal 9 April 1948, satu bulan sebelum Israel dinyatakan oleh PBB yang menewaskan lebih dari 100 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Pembantaian ini menunjukkan peran kelompok teroris ini, khususnya Irgun, dalam proses pembentukan negara Israel dan pendiaman pemerintah terhadapnya

mengingat tindakan teror ini memiliki efek positif dalam proses pembentukan negara.²³

Hal lainnya yang selalu berkaitan dengan sejarah pembentukan negara Israel adalah keberadaan bangsa Palestina dan perebutan tanah atas klaim-klaim yang didukung oleh kekuatan lobi dan politik internasional. Muchsin mencatat Palestina pada mulanya adalah bagian dari Daulah Islamiyah di bawah Kesultanan Turki Utsmani. Namun, menjadi tanah yang tidak merdeka pasca pendudukan Inggris (1917) yang kemudian diberikan begitu saja kepada bangsa pendatang Yahudi. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan perlawanan Muslim-Palestina terhadap Yahudi-Israel menggunakan pendekatan dan analisis historis. Penelitian ini menyatakan bahwa Zionis Israel menguasai Palestina karena mendapat dukungan dari negara-negara kuat seperti AS, Inggris dan Prancis. Sementara Palestina berjuang sendiri pasca kekalahan negara-negara muslim-Arab dalam perang enam hari untuk mempertahankan tanah Palestina.²⁴ Halbrook menulis tentang sejarah bagaimana Israel dapat menjadi negara yang berdiri dan merdeka dengan mengebiri hak-hak bangsa Palestina dari hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup di atas tanah sendiri dan hak untuk kembali ke tanah sendiri. Israel telah dengan sangat cerdik meaneksasi tanah-tanah Palestina dengan berbagai macam strategi dan metode dari yang sah sampai yang tidak sah menurut hukum. Dengan dukungan raksasa-raksasa global seperti Inggris dan AS, memberikan kemudahan bagi Israel untuk mencapai tujuannya. Israel melakukan

²³ Sellers, "The Irgun Zvai Leumi: From Terrorists to Politicians."

²⁴ Misri A Muchsin, "Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan," *MIQOT Vol. XXXIX*, no. 2 (December 2015), 390–406.

perampasan tanah dan pengusiran dengan kekerasan terhadap penduduk Palestina dari tanah mereka yang telah mereka garap dari generasi ke generasi. Di sisi lain, negara-negara Arab dan elit Arab juga bertanggung jawab terhadap nasib rakyat Palestina di mana mereka dengan sadar melakukan diskriminasi dan pengusiran terhadap warga Yahudi di negaranya, baik yang diusir atas dasar ke-Yahudi-annya atau atas dasar identitas Barat-Eropanya. Hal demikian tidak memberikan kontribusi positif apa-apa bagi rakyat Palestina.²⁵

Asaf Siniver menawarkan analisis alternatif terhadap pendekatan rasionalis yang dominan positivistik yang ditunjukkan oleh sebagian besar studi kebijakan Israel terhadap Palestina. Alih-alih berfokus pada pandangan realis di mana kekuasaan dan kepentingan nasional diasumsikan dapat mendikte kebijakan luar negeri dan pertahanan Israel sejak didirikan, Siniver lebih berfokus pada penyebab manifestasi ini. Dengan menggunakan metodologi konstruktivis, ia mengkaji cara di mana proses historis, budaya dan agama telah menciptakan identitas kolektif Israel yang unik yang dapat didefinisikan oleh dua konstruksi luar biasa dan mentalitas pengepungan. Menyadari pentingnya konstruksi ini dalam wacana politik, publik dan pendidikan sangat penting tidak hanya untuk pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan keamanan Israel, tetapi juga untuk menciptakan langkah-langkah yang kondusif menuju rekonsiliasi antara Israel dan Palestina.²⁶

²⁵ Stephen P. Halbrook, "The Alienation of a Homeland: How Palestine Became Israel," *The Journal Libertarian Studies* Vol. V, no. 4 (Fall 1981), 357–374.

²⁶ Asaf Siniver, "Israeli Identities and the Politics of Threat: A Constructivist Interpretation," *Ethnopolitics* Vol. 11, no. 1 (March 2012), 24–42.

Sebagai sebuah negara demokratis, Israel seperti negara-negara lainnya yang memiliki kedekatan dengan konflik, terlebih dalam kaitannya dengan perjuangan rakyat Palestina, memiliki beberapa kebijakan terkait dengan persoalan terorisme. Fleet menulis tentang kebijakan pertahanan Israel terkait pencegahan efektif untuk meminimalisir terorisme domestik. Menurut Fleet, Israel telah mengadopsi pandangan geo-politik anakronistik dari isu-isu di Tepi Barat/Gaza. Ia berpendapat bahwa proses rekonsiliasi akan menjadi metode yang lebih efektif untuk melawan terorisme domestik di Israel karena itu, jika dilakukan dengan benar, dapat mengatasi permasalahan yang sangat fundamental dirasakan oleh kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik.²⁷ Studená menulis tentang proses pengambilan keputusan dalam strategi kontraterorisme Israel dalam kerangka teoritis pendekatan *hard vs soft power*. Tujuan utama dari tulisannya adalah untuk menemukan kemungkinan cara menerapkan pendekatan *soft power* ke dalam pengambilan keputusan strategis anti-terorisme dalam skala yang lebih besar. Tujuan ini akan dicapai dengan mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari penekanan strategi kontra-terorisme *hard power* menurut persepsi internasional Israel dan kebijakan luar negerinya.²⁸

Penelitian ini memberikan fokusnya pada isu terorisme dalam perspektif Negara Israel. Merujuk pada beberapa literatur yang disebutkan di atas saya melihat hampir seluruhnya menggunakan pendekatan rasionalis-realis kecuali apa yang ditulis Asaf Siniver yang lebih bersifat konstruktivis dengan mengkaji proses

²⁷ Michael Joshua Fleet, "Defense and Counter-Terrorism in Israel," *Politikon: IAPSS Political Science Journal* Vol. 26 (2015), 66–83.

²⁸ Markéta Studená, "Israeli Decision Making Process in Counter-Terrorism Strategy" (Bachelor Thesis, Masaryk University, 2012), 1-55.

historis, budaya dan agama dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri Israel. Dengan demikian saya mencoba menjalankan apa yang telah dilakukan Siniver ini dengan menyandingkan pendekatan konstruktivis dengan term terorisme dalam perspektif Negara Israel dan mencoba melihat proses historis dan sosial-politik yang membersamainya. Sependek pembacaan saya, terorisme bagi Israel seperti satu entitas yang memiliki dua nama dan dua kemanfaatan. Pada masa perjuangan kemerdekaannya, komunitas Yahudi yang kemudian di masa akan datang menjadi elit Israel membiarkan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh banyak kelompok paramiliter Yahudi-Zionis demi mendukung pencapaian terbentuknya Negara Yahudi. Pasca berdiri kokohnya negara ini, label terorisme diputar balikkan mengarah dengan keras kepada kelompok-kelompok perjuangan rakyat Palestina dan simpatisannya yang merasa perlu untuk membantu perjuangan. Proyek kontra terorisme yang digalakkan Barat - termasuk Israel di dalamnya - merupakan sebuah kontradiksi dari upaya yang mereka lakukan di masa lalu, atau setidaknya pengakuan dan penghargaan mereka terhadap kelompok-kelompok teroris Yahudi yang telah memberikan kontribusi terhadap perjuangan pendirian Negara Israel. Penelitian ini mencoba melihat kebijakan kontra terorisme Israel sebagai sebuah fenomena yang jarang disinggung oleh penelitian-penelitian sebelumnya sebagai sebuah anomali dalam menerjemahkan terorisme itu sendiri.

Celah yang dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut di atas adalah tidak dilihat dan dikaitkannya fenomena terorisme bagi Israel melalui perspektif masa lalu sebagai sebuah negara yang berjuang mencapai kemerdekaan dan perspektif kontemporer sebagai sebuah negara yang mapan dan

perbandingan dari kedua sudut pandang ini. Sebagai sebuah kajian akademik penelitian saya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sebuah sudut pandang dalam melihat Israel dan keterkaitannya dengan terorisme. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih perspektif bagi permasalahan sosial-politik dengan tidak melihatnya hanya dalam kacamata hitam-putih, namun lebih jauh melihat suatu kondisi berdasarkan pada elemen-elemen yang membentuk dan mempengaruhinya. Hal ini dapat memberikan perspektif alternatif bagi pemerhati Timur Tengah, terlebih pemerhati konflik berkepanjangan Israel-Palestina.

Berkaitan dengan hal ini, terlalu luas jika saya menempatkan objek penelitian sepanjang perjalanan sejarah Israel. Lebih konkret jika saya menentukan ruang lingkup penelitian ini berdasarkan periode tertentu saja. Oleh karena itu saya menetapkan tiga periode yang berbeda dalam sejarah Israel bertumpu pada perodesasi kepemimpinan pemerintahannya. Pertama, periode awal negara modern Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) David Ben-Gurion (1948-1954 dan 1955-1963). Kedua, periode kepemimpinan aktor-aktor terorisme di masa perjuangan kemerdekaan, yaitu periode PM Menachem Begin (1977-1983) dan PM Yitzhak Shamir (1983-1984 dan 1986-1992). Ketiga, periode kontemporer di bawah kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu (1996-1999 dan 2009-sekarang).

Periode yang saya fokuskan ini menggambarkan periode konsolidasi awal negara, periode di bawah kepemimpinan aktor teroris, dan periode terkini yang menggambarkan progres perkembangan kebijakan Israel terhadap terorisme.

Penerapan periodisasi ini dimaksudkan bukan untuk melihat proses perubahan tertentu di Israel, entah secara gradual ataupun radikal dan bukan juga untuk menelaah orientasi kebijakan masing-masing periode kepemimpinan. Penggunaan periodisasi dimaksudkan hanya untuk melihat dan menyatakan bahwa perubahan demi perubahan memang ada dari satu waktu ke waktu yang lain sebagai suatu proses yang inheren dalam proses sosial-politik di Israel. Setiap periode menampilkan gambar yang berbeda sesuai dengan kondisi tertentu yang dihadapinya dan hal ini memberikan arti bahwa Israel sebagai negara tidak dilihat sebagai aktor tunggal sebagaimana terdapat dalam narasi realis. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat melalui konteks historis dan sosial yang mengirinya

E. Kerangka Teoretis

Penelitian yang saya kemukakan ini menyajikan kasus-kasus terorisme yang terjadi di Israel menggunakan pendekatan *State-sponsored Terrorism* yang juga sering disebut sebagai *State Terrorism*. Istilah ini dipakai untuk merumuskan tindakan suatu negara yang mengakomodasi aktivitas terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Pendekatan lain yang saya gunakan dalam mengumpulkan berbagai kasus terorisme di Israel adalah konsep *Counter Terrorism* yang hampir semua negara di seluruh dunia menerapkannya dalam upaya melawan aksi teror yang mengancam keamanan negara.

Melihat kedua aspek dalam terorisme di atas (*state terrorisme* dan *counter terrorisme*) dan pandangan Israel terhadap terorisme yang mana menurut hipotesis saya terdapat kontradiksi yang cukup signifikan dari beberapa praktik yang dilaksanakannya saya coba analisis menggunakan pandangan Konstruktivisme dari Alexander Wendt.²⁹

Konstruktivisme Alexander Wendt merupakan suatu teori dalam ilmu hubungan internasional yang terobsesi pada orientasi proses dalam melihat fenomena tertentu. Pijakan awal dari lahirnya teori ini adalah sebagai jalan tengah untuk membangun jembatan antara dua tradisi dominan dalam keilmuan hubungan internasional, yaitu perdebatan panjang antara kelompok realis-liberal dan rasionalis-reflektifis, termasuk di dalamnya perdebatan tentang anarki internasional dan dengan ini juga memberikan perluasan bagi kedua kutub pemikiran tersebut melalui pengembangan argumen konstruktivis. Argumen konstruktivis sendiri menurut Wendt diambil dari sosiologi strukturalis dan interaksionis simbolis berdasarkan klaim liberal bahwa lembaga internasional dapat mengubah identitas dan kepentingan negara.³⁰ Konstruktivisme menyandingkan secara bersamaan asumsi realis yang materialistik dengan dasar-

²⁹ Alexander Wendt adalah ilmuwan dan dosen politik Amerika kelahiran Jerman. Ia merupakan lulusan Macalester College 1982 dan memperoleh gelar Ph.D. dari University of Minnesota pada tahun 1989. Ia mengajar di Universitas Yale (1989–97), Dartmouth College (1997–99), dan Universitas Chicago (1999–2005) dan bergabung dengan fakultas ilmu politik Universitas Negeri Ohio pada tahun 2004 sebagai Profesor Keamanan Internasional Mershon. “Alexander Wendt | American Political Scientist and Educator,” *Encyclopedia Britannica*, accessed April 11, 2019, <https://www.britannica.com/biography/Alexander-Wendt>.

³⁰ Alexander Wendt, “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” *International Organization* Vol. 46, no. 2 (Spring 1992): 394.

dasar idealisme. Dengan demikian teori sosial konstruktivis menekankan pada penentuan bersama agen dan struktur melalui proses.³¹

Prinsip dasar teori sosial konstruktivisme adalah bahwa orang atau aktor akan bertindak terhadap suatu objek, termasuk aktor lain, berdasarkan makna yang dimiliki objek tersebut. Negara bertindak sesuatu terhadap musuh dan bertindak dengan tindakan yang berbeda terhadap teman. Hal demikian karena musuh bersifat mengancam dan sebaliknya teman tidak.³²

Perlu digarisbawahi bahwa negara yang didefinisikan sebagai aktor di sini berbeda dengan aktor organisasi dalam pandangan Weberian. Pandangan antropomorfis Weberian memang menjadi dasar dari pengembangan konstruksi aktor yang disebut Wendt sebagai aktor kesatuan. Aktor kesatuan merupakan sintesis dari aktor organisasi, kelompok kepentingan atau individu dalam masyarakat, dan struktur yang mengikat keduanya. Berbeda dengan pandangan Marxism yang juga mensintesakan pandangan organis dan pluralis dalam definisi struktur pemerintahan dan pemerintahan yang bertahan lama dalam masyarakat, konstruktivisme mengkonseptualisasikan negara sebagai aktor organisasi yang terkait secara internal dengan masyarakat yang diatur oleh struktur otoritas politik. Dengan kata lain konstruktivisme mengambil ketiga pandangan terhadap negara tersebut untuk disatukan dalam konsep negara sebagai aktor kesatuan.³³

³¹ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, Cambridge Studies in International Relations 67 (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 1999), 194.

³² Wendt, "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics," 396–397.

³³ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 193–201.

Dalam tulisan ini saya menerapkan beberapa ide utama dalam konstruktivisme untuk melihat bagaimana Israel sebagai negara menjadi aktor yang memaknai dirinya sendiri dan entitas lain dalam ruang baca aksi teror, ide kunci tersebut adalah identitas dan kepentingan.

Pendefinisian diri dan orang lain dalam teori konstruktivisme erat kaitannya dengan term identitas. Secara umum konsep identitas dapat dilihat melalui dua pemaknaan. Pertama, identitas sebagai kategori sosial, yaitu atribut atau karakteristik yang membedakannya dengan yang lain. Dengan kata lain bahwa konsepsi ini menegaskan antara “saya” dan “orang lain” yang terkonstruksi melalui proses interaksi. Untuk alasan inilah kemudian diperlukan intersubjektivitas dalam proses pemaknaan “saya/kita/kami/dia/mereka”. Pengaruh kelompok atau individu di luar aktor terhadap cara aktor memandang dirinya dan di luar dirinya tidak dapat dimengerti tanpa adanya pemahaman atas konteks sosial yang lebih luas di mana aktor yang bersangkutan berada.³⁴

Kedua, identitas yang dimaknai sebagai kategori personal, yaitu atribut atau karakteristik yang melekat dalam diri aktor yang kemunculannya tanpa memerlukan proses identifikasi perbedaan dengan entitas lain. Dengan kata lain berarti konsepsi identitas kedua ini menyatakan bahwa identitas itu disadari dengan sendirinya oleh aktor tanpa memerlukan adanya intersubjektivitas. Identitas personal memperlakukan diri sendiri sebagai pribadi yang unik yang berbeda dengan yang lain. Dalam hal ini aktor melakukan tindakan atas dasar

³⁴ Mohammad Rosyidin, *The Power of Ideas Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional* (Sleman: Tiara Wacana, 2015), 46.

kehendak dan tujuannya sendiri tanpa memperhatikan posisinya dalam konteks sosial.³⁵ Kedua jenis konsepsi identitas tersebut di atas termasuk dalam bahasan konstruktivisme dan dimaknai sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan.³⁶ Dalam hal ini identitas menjadi kaca mata bagi aktor untuk mempersepsikan lingkungan sekitarnya. Pemaknaan aktor terhadap lingkungan menjadi terjustifikasi berdasarkan pada pemahaman aktor terhadap dirinya sendiri dan “Yang lain”. Dalam bahasa lain sebagaimana disebutkan Rosyidin bahwa aktor memaknai situasi di luar dirinya dengan menggunakan atribut yang melekat pada dirinya atau dalam teori sosiologi interpretatif disebut dengan definisi situasi.³⁷

Dalam proses interaksi, logika hubungan dapat digambarkan sebagai sebuah siklus. Pemahaman diri aktor berimplikasi pada bagaimana ia akan bertindak. Sementara tindakan itu sendiri didasarkan pada kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai. Sama dengannya adalah identitas membentuk kepentingan, sedangkan kepentingan membentuk tindakan. Tindakan aktor tersebut kemudian pada gilirannya mempertahankan, memodifikasi, atau mengubah identitas tersebut.³⁸ Identitas adalah dasar dari kepentingan. Aktor tidak memiliki portofolio kepentingan terlepas dari konteks sosial; sebaliknya, mereka mendefinisikan kepentingan dalam proses mendefinisikan situasi.³⁹

³⁵ *Ibid.*, 47.

³⁶ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 224.

³⁷ Rosyidin, *The Power of Ideas*, 48.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Wendt, “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” 398.

Menurut Alexander Wendt terdapat empat jenis identitas.⁴⁰ Pertama, identitas personal, yakni atribut yang membentuk eksistensi negara yang membedakannya dengan negara lain. Identitas ini tidak hanya berlaku pada negara, ia dapat juga dikaitkan dengan entitas perusahaan atau organisasi. Identitas personal suatu negara tidak memerlukan pemaknaan dari negara lain karena identitas jenis ini otomatis muncul dari kesadaran negara sebagai individu. Dengan kata lain, tanpa kehadiran negara lain pun negara secara intrinsik mempunyai atribut-atribut yang membuatnya menjadi seperti itu.⁴¹

Semua negara memiliki identitas personal yang membuatnya berbeda dengan negara lain seperti wilayah teritorial, lambang negara, lagu kebangsaan, nasionalisme, dan lainnya. Identitas ini kemudian menciptakan kepentingan nasional yang akan disebutkan di bawah.⁴²

Kedua, *type identity* yaitu identitas yang menggolongkan suatu negara ke dalam kelompok tertentu yang mengacu pada kategori atau label sosial untuk berbagi beberapa karakteristik seperti tampilan, perilaku, sikap, nilai-nilai, keterampilan, pengetahuan, pendapat, pengalaman, kesamaan sejarah dan sebagainya. Dengan kata lain, identitas tipe merupakan derivasi dari identitas personal yang terkategori dan menentukan dirinya sendiri secara intrinsik.⁴³ Contoh dari jenis identitas ini misalnya yang berkaitan dengan ideologi; negara fasis, negara demokrasi, negara sosialis, dan negara sekuler, atau berkaitan dengan

⁴⁰ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 224–229.

⁴¹ Rosyidin, *The Power of Ideas*, 50.

⁴² *Ibid.*, 50–51.

⁴³ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 225.

mayoritas populasi; negara muslim, atau karakteristik domestik tertentu seperti; negara pasifis.⁴⁴

Ketiga, *role identity* atau identitas peran, yaitu pandangan akan kedudukan suatu negara di tengah-tengah “Yang Lain”. Identitas peran memiliki ketergantungan pada konteks budaya dan “Yang Lain”. Hal terpenting dalam mendefinisikan peran bukanlah pelembagaan tetapi tingkat saling ketergantungan atau keintiman antara “Diri” dan “Yang Lain” sehingga ia tidak bersifat intrinsik.⁴⁵ Identitas peran berkenaan dengan tanggung jawab negara berkaitan dengan apa yang seharusnya negara lakukan dalam konteks situasi yang sedang dihadapinya. Untuk mengetahui posisi dan tanggung jawab tersebut negara memerlukan keberadaan entitas lain sebagai pembanding atau oposisi dari tanggung jawab yang diembannya. Oleh karena itu maka proses terbentuknya identitas peran ini tidak dapat dipisahkan dari proses interaksi yang mendahuluinya. Ketika negara tengah berada dalam suatu hubungan interaksi maka di situ pulalah terjadi proses timbal-balik untuk menginterpretasi dan mereinterpretasi bagaimana untuk menyadari posisi dan kedudukannya. Pemahaman suatu negara terhadap posisi dan kedudukannya ditentukan oleh faktor domestik dan internasional. Faktor domestik dapat berupa nilai yang dianut, letak geografis, kapabilitas yang dimiliki, opini publik, persepsi elit, dan lainnya. Faktor internasional seperti struktur internasional, nilai dan norma internasional,

⁴⁴ Rosyidin, *The Power of Ideas*, 51–52.

⁴⁵ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 227–228.

dan persepsi negara lain. Contoh dari identitas ini antara lain Amerika Serikat sebagai negara “mercusuar” atau negara “tentara salib”.⁴⁶

Keempat, identitas kolektif yaitu identifikasi antara “Diri” dan “Yang Lain” secara logis. Identifikasi ini adalah proses kognitif yang mengaburkan batas antara “Diri” dan “Yang Lain”. Berbeda dengan identitas peran yang menempatkan “Diri” dan “Yang Lain” dalam peran yang berbeda, identitas kolektif menggabungkan keduanya menjadi satu identitas.⁴⁷ Hal ini berarti aktor-aktor memiliki kesamaan pikiran dan perasaan. Identitas ini berdasarkan pada logika kelompok dan rasa solidaritas. Individu atau aktor dalam kelompok akan saling mengidentifikasi satu sama lain sebagai teman. Identifikasi positif ini menciptakan struktur pemahaman bersama yang mengikat mereka dalam satu identitas tunggal. Ikatan solidaritas itu menyingkirkan motif individualitas dari masing-masing aktor.⁴⁸

Dengan adanya kesamaan identitas maka akan menciptakan kesamaan kepentingan dan kemudian akan melahirkan kesamaan tindakan. Sebuah kelompok yang terdiri dari individu-individu dengan kesamaan kepentingan akan bertindak berdasarkan kepentingan bersama sebagaimana individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya.⁴⁹

⁴⁶ Rosyidin, *The Power of Ideas*, 53–56.

⁴⁷ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 229.

⁴⁸ Rosyidin, *The Power of Ideas*, 56–57.

⁴⁹ *Ibid.*, 57–58.

Faktor-faktor yang dapat membentuk identitas kolektif dihimpun dalam variabel master yang terdiri dari antara lain: interdependensi; *common fate*; homogenisasi; and *self-restraint*.⁵⁰

Wendt membagi variabel-variabel ini menjadi dua jenis. Tiga pertama (interdependensi; *common fate*; homogenisasi;) merupakan penyebab aktif dari identitas kolektif. Sedangkan *self-restraint* adalah penyebab permisif. Keempatnya dapat ditemukan dalam berbagai kasus, semakin banyak variabel yang ditemukan semakin besar kemungkinan pembentukan identitas kolektif.⁵¹

Interdependensi berarti di mana aktor saling tergantung ketika hasil interaksi bagi setiap pihak tergantung pada pilihan “Yang Lain”. Meskipun saling ketergantungan sering digunakan untuk menjelaskan kerja sama, sebenarnya hal ini tidak terbatas pada hubungan kerja sama; musuh dapat saling bergantung seperti teman. Untuk menyebabkan identitas kolektif, saling ketergantungan harus objektif bukan subyektif, karena begitu identitas kolektif ada, pelaku akan mengalami keuntungan dan kerugian masing-masing. Hubungan antara saling ketergantungan subyektif dan identitas kolektif bersifat konstitutif bukan kausal.⁵²

Common fate berarti aktor menghadapi nasib yang sama ketika keberlangsungan, kemampuan, atau kesejahteraan mereka tergantung pada apa yang terjadi pada kelompok secara keseluruhan. Sama halnya dengan interdependensi, *Common fate* hanya dapat menjadi sebab terbentuknya identitas kolektif jika

⁵⁰ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 343.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, 334.

berada dalam kondisi objektif, karena kesadaran subjektif bukanlah sebab dari identitas kolektif melainkan hanya merupakan faktor konstitutif. Memiliki nasib yang sama kadang-kadang bisa menjadi baik, tetapi dalam politik internasional sering kali buruk, biasanya didasari oleh ancaman eksternal terhadap kelompok. Ancaman itu bisa bersifat sosial atau material. Perlu diperhatikan bahwa *Common fate* bukanlah hal yang sama dengan Interdependensi. Interdependensi berarti bahwa pilihan aktor mempengaruhi hasil satu sama lain, dan karenanya menyiratkan interaksi. *Common fate* tidak memiliki implikasi seperti itu. Meskipun mereka tidak saling berinteraksi satu sama lain, *common fate* bisa saja menyebabkan terbentuknya identitas kolektif. Interdependensi berasal dari interaksi dua pihak; *Common fate* dibentuk oleh pihak ketiga yang mendefinisikan dua yang pertama sebagai suatu kelompok.⁵³

Homogenisasi adalah penyebab efisien terakhir pembentukan identitas kolektif. Aktor dapat sama dalam dua pengertian yang relevan, dalam identitas personal dan identitas tipe. Seperti di atas, penting untuk membedakan antara masalah obyektif dan subyektif. Konsep identitas kolektif mengandaikan bahwa anggota mengkategorikan diri mereka sendiri sama di sepanjang dimensi yang mendefinisikan kelompok, dan dengan demikian persepsi homogenitas membantu membentuk identitas kolektif. Oleh karena itu, harus ada hubungan kausal antara homogenitas obyektif dan kategorisasi subyektifnya. Hipotesisnya adalah bahwa peningkatan homogenitas obyektif menyebabkan aktor untuk mengkategorikan orang lain seperti diri mereka sendiri. Mengkategorikan orang lain mirip dengan

⁵³ *Ibid.*, 349.

diri sendiri bukanlah hal yang sama dengan mengidentifikasi diri dengan mereka, meski demikian ia dapat memupuk yang terakhir.⁵⁴

Terlepas dari potensi kelonggaran antara realitas objektif dan representasi subyektifnya, homogenisasi bukanlah kondisi yang cukup untuk pembentukan identitas kolektif karena dua alasan lain. Pertama, ketika para aktor menjadi serupa di sepanjang beberapa dimensi, mereka dapat membedakan diri mereka di sepanjang dimensi lain, bahkan untuk hal yang sepele. Kelompok ada untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, dan jika kebutuhan itu terancam, mereka akan rentan terhadap tanggapan defensif. *Kedua*, mengapa homogenisasi mungkin gagal menghasilkan identitas kolektif adalah bahwa ketika para aktor menjadi lebih mirip, ada sedikit potensi pembagian kerja di antara mereka. Pembagian kerja meningkatkan sejauh mana para aktor saling bergantung dan menderita nasib yang sama. Keduanya telah menjadi penyebab pembentukan identitas kolektif.⁵⁵

Jika secara teori seseorang dapat membayangkan sebuah komunitas dengan keanekaragaman yang tak terbatas, dalam praktiknya masyarakat membutuhkan beberapa konsensus tentang nilai-nilai dan institusi. Hal-hal lain dianggap sama, homogenitas memfasilitasi konsensus itu dengan mengurangi konflik dan meningkatkan kemampuan untuk melihat “Diri” dan “Yang lain” sebagai anggota kelompok yang sama. Hal-hal lain mungkin tidak sama, tetapi itu tidak

⁵⁴ *Ibid.*, 353–354.

⁵⁵ *Ibid.*, 355–356.

mengurangi kontribusinya. Ini hanya berarti bahwa kontribusi harus dipahami dalam kaitannya dengan mekanisme sebab-akibat lainnya.⁵⁶

Self-restraint atau menahan diri bukanlah penyebab aktif identitas kolektif karena itu tidak mengemukakan apapun terkait kesediaan untuk membantu orang lain. Dalam politik domestik hal ini ditemukan dalam kekuatan koersif negara. Aktor-aktor yang saling berinteraksi menahan diri untuk menghargai kepentingan aktor lain dalam ruang lingkup identitas kolektif dan merupakan insentif positif terhadap tiga variabel master yang disebut sebelumnya⁵⁷.

Keempat variabel master tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam tiga faktor determinan, yaitu faktor struktural, faktor sistemik, dan faktor strategis.⁵⁸

Faktor struktural adalah faktor intersubjektivitas antar negara. Jadi struktur di sini bukan dalam arti struktur keseimbangan kekuasaan yang ditentukan secara murni oleh kapabilitas material. Struktur intersubjektivitas mengacu pada bagaimana negara-negara mengidentifikasi satu sama lain. Identitas kolektif terwujud manakala negara-negara saling mempersepsi sebagai teman. Artinya, ada identifikasi positif di antara mereka sehingga hubungan internasional dikendalikan oleh logika pertemanan.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.*, 357.

⁵⁷ *Ibid.*, 363.

⁵⁸ Alexander Wendt, "Collective Identity Formation and the International State," *The American Political Science Review* Vol. 88, no. 2 (June 1994): 389–391.

⁵⁹ Rosyidin, *The Power of Ideas*, 59.

Faktor sistemik berkaitan dengan interaksi antar negara. Tingkat saling ketergantungan dalam kesamaan nilai yang dianut merupakan *building block* yang membangun identitas kolektif. Tingkat saling ketergantungan dapat diukur dari kerjasama yang dibina, misalnya dalam hal perdagangan atau interaksi antar manusia, serta sama-sama mempunyai persepsi terhadap musuh bersama. Sedangkan kesamaan nilai dianut, misalnya memiliki homogenitas ideologi, agama, budaya, etnis dan sebagainya.⁶⁰

Faktor ketiga yang membentuk identitas kolektif adalah faktor strategis yaitu yang berkaitan dengan sikap dan komunikasi antar negara. Semakin negara menunjukkan sikap kooperatif dan ramah satu sama lain, maka semakin positif persepsi dari negara yang terlibat. Disamping itu untuk mengikat solidaritas diperlukan penciptaan wacana tertentu sebagai komunikasi simbolik yang berperan sebagai sarana homogenisasi identitas dan kepentingan.⁶¹

Kepentingan dalam pembacaan Wendt dibedakan dalam dua jenis, obyektif dan subyektif.⁶²

Kepentingan obyektif adalah kebutuhan atau keharusan fungsional yang harus dipenuhi jika identitas harus direproduksi. Keempat jenis identitas memiliki persyaratan reproduksi seperti itu. Ketika aktor menginternalisasi identitas tertentu, ia memperoleh dua disposisi, pertama, untuk memahami persyaratannya dan kedua, untuk bertindak berdasarkan pemahaman itu. Keduanya memastikan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, 60.

⁶² Wendt, *Social Theory of International Politics*, 231.

upaya berkelanjutan untuk mereproduksi identitas. Konsep kepentingan subyektif mengacu pada keyakinan-keyakinan yang sebenarnya dimiliki oleh para aktor tentang bagaimana memenuhi kebutuhan identitasnya, dan inilah motivasi terdekat terhadap tindakan.⁶³

Tindakan aktor/negara dimotivasi oleh berbagai kepentingan yang berakar pada identitas personal, jenis, peran, dan kolektif. Sebagian besar identitas ini ditemukan bervariasi secara budaya dan historis. Wendt berpendapat bahwa generalisasi universal kepentingan nasional didasarkan pada identitas personal. Meski demikian, ia juga menambahkan bahwa kepentingan ini, yang disebutnya sebagai kepentingan pra-sosial dipengaruhi oleh identitas tipe, identitas peran, dan identitas kolektif.⁶⁴

Konsep kepentingan nasional mengacu pada persyaratan reproduksi atau keamanan kompleks negara-masyarakat. Menurut Wendt definisi ini merujuk pada kepentingan objektif. Sedangkan keadaan subyektif dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan. Kepentingan nasional bukan semata-mata pedoman normatif terhadap tindakan, tetapi juga kekuatan kausal yang mempengaruhi negara untuk bertindak dengan cara tertentu. Hal ini sebagian karena negara memiliki kebutuhan keamanan tertentu (kepentingan obyektif) sehingga mereka menentukan kepentingan subyektif mereka seperti yang mereka lakukan. Hubungan antara kepentingan obyektif dan subyektif tidak ditentukan, tetapi

⁶³ *Ibid.*, 232.

⁶⁴ *Ibid.*, 233–234.

dalam jangka panjang kegagalan terus-menerus menyelaraskan kepentingan subyektif dan obyektif akan menyebabkan matinya aktor.⁶⁵

Kepentingan nasional menurut konstruktivisme dibangun oleh kelompok dominan dalam masyarakat untuk mengamankan identitas tertentu dan bahwa kepentingan dan identitas muncul dari interaksi sosial. Bagi konstruktivis, tidak ada kepentingan yang *a priori*. Kepentingan dikembangkan, dipelajari dan dipelajari kembali dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari pengalaman dan refleksi. Konstruktivis menolak gagasan kepentingan permanen dari pemikiran realisme. Hal ini dikarenakan jika kepentingan ditentukan melalui interaksi sosial, ia akan berubah-ubah seiring pengalaman-pengalaman interaksi sosial dari waktu ke waktu.⁶⁶

Melanjutkan tesis Robert Keohane, Wendt merumuskan empat kepentingan nasional: kelangsungan hidup fisik, otonomi, dan kesejahteraan ekonomi, harga diri kolektif.⁶⁷ Secara singkat kepentingan tersebut meliputi kepentingan nasional berkaitan dengan kedaulatan, otonomi, kesejahteraan dan harga diri.⁶⁸

Kelangsungan hidup fisik mengacu pada analisis terhadap individu yang membentuk kompleks negara-masyarakat, tetapi karena tidak ada individu yang penting bagi identitas kolektif, yang dimaksud di sini adalah *survival of the complex*. Individu atau bagian tertentu dapat dikorbankan untuk tujuan itu, seperti dalam perang. Prancis tidak “mati” ketika kehilangan Alsace-Lorraine pada tahun

⁶⁵ *Ibid.*, 234.

⁶⁶ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005), 196.

⁶⁷ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 235.

⁶⁸ Wendt, “Collective Identity Formation and the International State,” 385.

1871. Pada abad kedelapan belas menyerahkan wilayah ke negara-negara lain sebagai kompensasi dan hal ini adalah hal biasa. Praktik ini tidak dapat dibayangkan terjadi saat ini dengan semakin berkembangnya identifikasi kelangsungan hidup dengan pelestarian wilayah yang ada, meskipun negara terkadang masih memutuskan bahwa adalah kepentingan nasional untuk membiarkan wilayah pinggiran memisahkan diri, seperti halnya negara-negara Soviet dan Cekoslowakia. Ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai keberlangsungan hidup bervariasi secara historis.⁶⁹

Otonomi mengacu pada kemampuan negara-masyarakat kompleks untuk melakukan kontrol atas alokasi sumber daya dan pilihan pemerintah. Untuk mereproduksi identitasnya, kompleks negara tidak cukup hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga harus mempertahankan kebebasannya. Kesejahteraan ekonomi mengacu pada pemeliharaan mode produksi dalam masyarakat dan, dengan perluasan, basis sumber daya negara. Harga diri kolektif mengacu pada kebutuhan kelompok untuk merasa baik tentang dirinya sendiri, untuk rasa hormat atau status. Harga diri adalah kebutuhan dasar individu manusia, dan salah satu hal yang dicari individu dalam keanggotaan kelompok. Sebagai ungkapan dari keinginan ini, kelompok juga memperoleh kebutuhan. Seperti kepentingan nasional lainnya, hal itu dapat diungkapkan dengan cara yang berbeda. Faktor kuncinya adalah apakah citra-diri kolektif itu positif atau negatif, yang sebagian akan bergantung pada hubungan dengan “Yang Lain”, karena dengan mengambil perspektif “Yang Lain”-lah “Diri” sendiri dapat dilihat. Citra-diri yang negatif

⁶⁹ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 235.

cenderung muncul dari pengabaian atau penghinaan yang dirasakan oleh negara-negara lain, dan karena itu mungkin sering terjadi di lingkungan internasional yang sangat kompetitif. Karena kelompok tidak mentoleransi citra seperti itu untuk waktu yang lama jika mereka ingin memenuhi kebutuhan harga diri anggota mereka, mereka akan mengimbangi dengan penegasan diri dan/atau devaluasi dan agresi terhadap “Yang Lain”. Citra diri yang positif, sebaliknya, cenderung muncul dari rasa saling menghormati dan kerja sama. Pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain tampaknya sangat penting di sini, karena itu berarti bahwa setidaknya secara resmi suatu negara memiliki status yang sama di mata negara lain.⁷⁰

Keempat kepentingan ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi jika negara-masyarakat kompleks menginginkan keamanan, dan dengan demikian mereka menetapkan batas obyektif pada apa yang dapat dilakukan negara dalam kebijakan luar negeri. Terkadang ditemukan implikasi kontradiktif yang memerlukan prioritas, tetapi dalam jangka panjang keempatnya harus dipenuhi.⁷¹

Mengutip Weldes, Burchill mencatat bahwa kepentingan nasional adalah konstruksi sosial yang diciptakan sebagai objek yang bermakna dari makna intersubyektif dan budaya mapan yang dengannya dunia dapat dipahami. Lebih khusus, kepentingan nasional muncul dari representasi, deskripsi situasi dan definisi masalah di mana orang-orang memahami dunia di sekitarnya.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*, 235–236.

⁷¹ *Ibid.*, 237.

⁷² Burchill, *The National Interest in International Relations Theory*, 203.

Meski penerapan teori ini seharusnya diaplikasikan dalam konteks hubungan internasional antara negara dengan negara mengingat tesis awal dari teori ini merupakan jalan tengah dari term anarki dalam hubungan internasional, namun tidak menutup kemungkinan jika teori ini diterapkan dalam konteks hubungan negara sebagai aktor dengan entitas lain selain negara, dalam hal ini kelompok teroris dengan berbagai latar belakang yang menyertainya. Hal ini berdasarkan pada apa yang dikatakan Wendt, konstruktivisme secara substansial bersifat terbuka dan dapat diterapkan pada setiap bentuk sosial. Jadi, untuk mengatakan apa pun yang konkrit, kita harus menentukan aktor (unit analisis) dan struktur (level) mana yang kita minati.⁷³

Saya melihat persinggungan antara Israel dengan berbagai kelompok teroris dari berbagai macam latar belakang dapat dijawab dengan menggunakan kacamata konstruktivisme mengingat teori ini lebih terfokus pada proses dalam tindakan yang kemudian dijalankan negara.

Secara garis besar konstruktivisme menjelaskan tindakan aktor/negara berdasarkan bagaimana ia telah memberikan makna terhadap dirinya sendiri, aktor/negara lain sebagai “Yang Lain”, dan konteks/kondisi yang tengah dihadapi. Proses pemaknaan tersebut kemudian melahirkan identitas. Tindakan yang dilakukan tidak serta merta lahir setelah proses pemaknaan telah dilakukan. Tindakan dilakukan dengan berpreferensi pada minat dan kepentingan yang ada di belakang keberadaan aktor/negara. Minat dan kepentingan ini sendiri adalah konsekuensi dari identitas yang telah ditentukan. Dalam kasus yang saya bahas di

⁷³ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 193.

sini dapat dijelaskan seperti bagaimana Israel sebagai aktor memaknai dirinya sendiri berdasarkan identitas yang melekat padanya, baik secara personal dan sosial, dan bagaimana Israel memaknai eksistensi kelompok teroris dalam konteks interaksi dalam aksi-aksi teror. Identitas Israel yang berhadapan dengan identitas teroris serta proses interaksi yang mengiringi persinggungan keduanya melahirkan tindakan yang dilakukan. Tindakan Israel tersebut sepenuhnya berlandaskan pada minat atau kepentingan yang lahir dari identitasnya.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis yang mana melihat dan menempatkan faktor-faktor kausatif dari sebuah fenomena sebagai suatu yang mempengaruhi terbentuknya realitas sosial yang terjadi saat ini.⁷⁴ Faktor-faktor determinan dalam kasus Israel antara lain seperti faktor kesejarahan bangsa, negara, dan masyarakat Israel, pola pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat, dan situasi dan kondisi politik yang turut berjalan mengiringinya. Penelitian ini bertumpu pada satu teori dasar sebagai landasan bagi perkembangan penelitian.⁷⁵ Teori yang dimaksud adalah konstruktivisme sebagaimana disebutkan sebelumnya. Landasan teori ini sepenuhnya bersifat sementara mengingat pentingnya elaborasi lebih lanjut dengan teori-teori dan konsep-konsep lain yang dapat membantu proses analisis dalam penelitian.

⁷⁴ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi Keempat. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 8.

⁷⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Batu, Malang: Literasi Nusantara, 2019), 17.

Sebagai penelitian kualitatif tulisan ini menempatkan literatur-literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen yang tersedia sebagai bahan penelitian. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, posisi penulis menempati kedudukan sebagai instrumen inti dalam penelitian ini. Metode yang saya gunakan adalah metode studi kasus dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang spesifik terkait dengan isu terorisme di Israel. Penelitian ini menempatkan studi kasus kolektif untuk dapat diidentifikasi agar dapat dibandingkan. Metode komparasi ini digunakan untuk melihat kasus-kasus yang terpisah secara parsial kemudian diinterpretasi sebagai bagian-bagian yang saling bertautan.

Adapun data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dibedah dengan teknik analisis holistik dari keseluruhan kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang diharapkan secara komprehensif dapat menjelaskan seluruh isi tulisan dari awal sampai akhir penelitian. Pembagian bab ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan masing-masing isi pembahasan dari tiap babnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penulisan, kajian pustaka, rumusan masalah, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi penyajian data serta analisis tentang definisi terorisme menurut sudut pandang Israel, terutama merujuk pada aturan hukum yang ada dan pendapat para elit politiknya. Bab ini juga memuat definisi terorisme menurut para ahli dan lembaga-lembaga nasional atau internasional sebagai perbandingan bahwa pola pendefinisian yang ditemukan di Israel juga dapat ditemukan di ranah akademik dan di dunia secara umum.

Bab ketiga memaparkan kebijakan-kebijakan Israel dalam menyikapi terorisme dan analisis terkait perbedaan kebijakan terhadap terorisme yang terdapat di Israel. Bab ini menghadirkan kasus demi kasus yang tercatat secara historis dalam catatan-catatan akademik dan kemudian mengkategorikan dan membandingkannya dalam proses analisis.

Bab keempat menganalisis tujuan penerapan kebijakan-kebijakan Israel terhadap terorisme. Bab ini menelisik preferensi yang mendorong Israel untuk menerapkan berbagai bentuk kebijakan.

Kemudian terakhir, bab kelima adalah kesimpulan dari temuan-temuan dalam penelitian yang merupakan jawaban dari setiap pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terorisme didefinisikan secara subjektif di Israel berdasarkan pada beragamnya aturan hukum yang dibuat dan fleksibilitas penerapannya dalam kondisi-kondisi tertentu serta merujuk pada variasi pendapat para elit negara yang menafsirkan terorisme secara beragam dan subjektif.

Kebijakan dan sikap yang dilakukan oleh Israel dalam menanggapi berbagai aksi teror tampak ambivalen. Untuk beberapa kasus, Israel mengeluarkan kebijakan dan respon yang relatif cukup lunak bahkan menjurus kepada keberpihakan. Dalam kasus-kasus yang lain, Israel meresponnya dengan sangat keras. Merujuk pada keberagaman definisi dan pendefinisian tentang terorisme yang subjektif, kebijakan yang ambivalen ini memiliki landasan dan penafisan yang dapat dibenarkan.

Ambivalensi sikap dan kebijakan Israel dikarenakan berbedanya aktor, objek, dan konteks teror yang dihadapi. Kebijakan yang relatif cukup lunak diberikan kepada mereka yang melakukan aksi teror namun secara langsung ataupun tidak langsung memberikan kemanfaatan tersendiri bagi keberadaan dan kepentingan negara. Kebijakan yang keras dilaksanakan untuk merespon aksi teror yang sepenuhnya memberikan dampak buruk bagi negara. Aksi-aksi teror ini terutama yang dilakukan oleh individu atau kelompok teroris Arab-Palestina atau Arab lainnya atau Israeli yang merugikan atau melawan kepentingan masyarakat

dan negara Israel. Kedua kebijakan dan sikap yang bertolak belakang ini saya rangkum dalam tipologi *terrorism acts with benefit* dan *terrorism acts without benefit* di mana yang pertama aksi teror memberikan efek positif bagi negara maka Israel akan memperlakukannya secara lunak dan yang terakhir memberikan efek negatif bagi negara yang secara langsung mendapatkan respon keras dari Israel.

Perbedaan perlakuan yang ambivalen ini merujuk pada unsur identitas yang melekat pada negara di satu sisi dan identitas yang dimiliki oleh entitas teroris di sisi lain. Untuk entitas *terrorism acts with benefit*, Israel dinilai memiliki identitas yang sama sehingga memungkinkan keduanya berbagi identitas yang terbentuk secara budaya dan historis. Berbeda dengan yang pertama, entitas *terrorism acts without benefit* secara gamblang tentu memiliki perbedaan identitas dengan Israel sebagai negara yang di dalam wilayahnya terjadi aksi terorisme.

Selain berbagi identitas, negara Israel dan entitas *terrorism acts with benefit* juga berbagi kepentingan sebagai preferensi dan tujuan dari tindakan yang dilaksanakan.

Kepentingan nasional Israel menjadi panduan bagi kedua aktor yang saling bergantung dan mengalami nasib yang sama untuk berbagi identitas dan kemudian pada gilirannya berbagi kepentingan yang telah terkonstruksi sedemikian rupa sebagai kepentingan objektif negara. Kepentingan-kepentingan ini meliputi kepentingan kedaulatan yang merangkum keamanan, keunggulan demografi, dan

eksistensi negara serta kepentingan harga diri yang lebih merujuk pada ideologi negara serta cita-cita awal berdirinya negara yang diterjemahkan oleh gerakan Zionisme-Yahudi-Sekuler.

Dalam simpulan ini saya dapat menarik benang merah bahwa dalam dunia politik perspektif apapun selalu bermuara pada kepentingan aktor pelaksananya. Dalam wacana terorisme sendiri, kompleksitas suatu negara dalam melihat, menghadapi, dan memperlakukannya sangat bergantung pada atribut-atribut yang melekat secara bersamaan baik pada aktor pelaksananya ataupun pada aktor yang diobjektifikasi.

Israel telah mengambil posisi teguh dalam menetapkan *stand point*-nya. Secara terstruktur Israel telah membuat landasan-landasan hukum yang relevan untuk kemudian dapat dirujuk dalam berbagai konteks aksi teror yang dihadapinya. *Instrumental value* dan kebijakan yang bervariasi saling bersambut untuk menjaga dan melestarikan kepentingan nasional negara yang ditanggung secara bersama-sama bukan hanya oleh negara namun juga oleh semua elemen dan aktor yang dapat berkontribusi.

B. Saran

Berkaitan dengan berhentinya penelitian ini pada kesimpulan yang disebutkan di atas, saya ingin memberikan rekomendasi di ranah akademik dalam beberapa hal;

1. Melakukan penelitian untuk melihat perubahan kebijakan Israel dari periode ke periode secara lebih komprehensif.
2. Melakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Israel dari masa ke masa.
3. Melakukan penelitian terhadap negara-negara yang memiliki kemungkinan sikap yang tidak konsisten dalam menghadapi kasus atau objek tertentu.
4. Melakukan penelitian terkait isu terorisme dengan menggunakan perspektif proses.
5. Melakukan penelitian yang akan menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam melihat terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. *Eichmann in Jerusalem*. Translated by Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . *On Violence*. New York: Harcourt, Brace & World, 1970.
- Bar, Shmuel. “Deterrence to Palestinian Terrorism: The Israeli Perspective.” In *Detering Terrorism*, edited by Alex Wilner and Andreas Wenger. Stanford, California: Stanford University Press., 2012.
- Bar, Shmuel, Rachel Machtiger, and Shmuel Bachar. “Deterrence of Palestinian Terrorism – The Israeli Experience: A Critical Analysis.” In *Israel at Sixty: Tests of Endurance*. Vol. 8. Herzliya, Israel: The Interdisciplinary center Herzliya, 2008.
- Barak-Erez, Daphne. “Israel’s Anti-Terrorism Law: Past, Present and Future.” In *Global Anti-Terrorism Law and Policy*, edited by Victor Vridar Ramraj, 597–620. 2nd ed. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, t.t.
- Baukhol, Ingrid. “Security and Fear in Israeli and Palestinian Conflict Narratives A Social-Psychological Study.” Thesis, University of Gothenburg, 2015.
- Bell, J. Bowyer. *Terror out of Zion: Irgun Zvai Leumi, LEHI, and the Palestine Underground, 1929-1949*. New York: St. Martin’s Press, 1977.
- Ben-Gurion, David. *Rebirth and Destiny of Israel*. New York: Philosophical Library, 1954.
- Brym, Robert J., and Robert Andersen. “Rational Choice and the Political Bases of Changing Israeli Counter Insurgency Strategy.” *The British Journal of Sociology* Vol. 62, no. 3 (September 2011): 482–503.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Burchill, Scott. *The National Interest in International Relations Theory*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Carr, Stephen R. “Book Analysis: Terrorism--How The West Can Win.” Air Command and Staff College Air University, n.d.
- Chazan, Barry I. *A Philosophy of Israel Education: A Relational Approach*. Switzerland: Springer Nature, Springer International Publishing AG, 2016.

- Chomsky, Noam. *Pirates and Emperor*. Translated by Eka Saputra and Khanifah. Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2017.
- Cline, Eric H. *Jerusalem Besieged: From Ancient Canaan to Modern Israel*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004.
- Couto, Richard A. "The Politics of Terrorism: Power, Legitimacy, and Violence." *Toward Development of Politics and the Political* Vol. 6, no. 1 (March 2010): 63–81.
- Couture, Adam. "Menachem Begin's Irgun and Zionist Revisionism: 1944-1948." University of Wisconsin - Eau Claire, t.t.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Fleet, Michael Joshua. "Defense and Counter-Terrorism in Israel." *Politikon: IAPSS Political Science Journal* Vol. 26 (2015): 66–83.
- Gould, Eric D., and Esteban F. Klor. "Does Terrorism Work?" *Journal of World-Systems Research*, Vol. XIV, no. 2 (2009): 91–118.
- Halbrook, Stephen P. "The Alienation of a Homeland: How Palestine Became Israel." *The Journal Libertarian Studies* Vol. V, no. 4 (Fall 1981): 357–374.
- Hamanaka, Shingo. "Foreign Affairs, the National Interest, and Secular-Religious Identities in Israel." XXIII:1–18. Montreal: International Association of Political Science, 2014.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Batu, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Heller, Joseph. *The Stern Gang: Ideology, Politics, and Terror, 1940-1949*. London ; Portland, Or: Frank Cass, 1995.
- Hitler, Adolf. *Mein Kampf*. Translated by R.W. Sinaga. Yogyakarta: Narasi, 2007.
- Husaini, Adian. *Pragmatisme Dalam Politik Zionis Israel*. Jakarta: Khairul Bayaan, 2004.
- Islami, Muhammad Nur. *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Jahroni, Jajang, ed. *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, Dan Model*. Edisi Pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016.

- Kapitan, Tomis. "Terrorism in the Arab-Israeli Conflict." In *Terrorism*, edited by Igor Primoratz, 175–191. London: Palgrave Macmillan UK, 2004.
- Karim, M. Abdul. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- Kopstein, Jeffrey, and Mark Lichbach. *Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Landler, Mark. "Trump Recognizes Jerusalem as Israel's Capital and Orders U.S. Embassy to Move." *The New York Times*, January 20, 2018, sec. World. Accessed March 30, 2019. <https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html>.
- Landler, Mark, and David M. Halbfinger. "Trump, With Netanyahu, Formally Recognizes Israel's Authority Over Golan Heights." *The New York Times*, March 26, 2019, sec. U.S. Accessed March 30, 2019. <https://www.nytimes.com/2019/03/25/us/politics/benjamin-netanyahu-donald-trump-meeting.html>.
- Lilienthal, Alfred M. *The Zionist Connection II: What Price Peace?* 1st. ed. New Brunswick, N.J: North American, 1982.
- Lizardo, Omar. "Defining And Theorizing Terrorism: A Global Actor-Centered Approach." *Journal of World-Systems Research* Vol. XIV, no. 2 (2008): 91–118.
- Lutz, James M., and Brenda J. Lutz. *Global Terrorism*. London ; New York: Routledge, 2004.
- Lutz, James M, and Brenda J Lutz. *Terrorism: Origins and Evolution*. Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Matanasi, Petrik. "Masa Bersiap Pasca-Merdeka: Masa Ngeri Tak Ada Sedapnya." *tirto.id*. Accessed March 24, 2019. <https://tirto.id/masa-bersiap-pasca-merdeka-masa-ngeri-tak-ada-sedapnya-cGog>.
- Mayamey, Babak. "Zionism A Critical Account 1897-1948. The Development of Israel and the Exodus of Palestine from A 'New Historian' Perspective." *POLIS Journal* Vol. 4 (Winter 2010): 1–34.
- Migdal, Joel S. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1988.
- Morris, Benny. *1948: A History of the First Arab-Israeli War*. New Haven, CT: Yale University Press, 2008.

- Muchsin, Misri A. "Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan." *MIQOT* Vol. XXXIX, no. 2 (December 2015): 390–406.
- Naharong, Abdul Muis. "Terorisme Atas Nama Agama." *Refleksi* Vol. 3, no. 5 (October 2013): 593–622.
- Netanyahu, Benjamin. *Terrorism - How the West Can Win*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1986.
- Nuechterlein, Donald E. "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making." *British Journal of International Studies* Vol. 2, no. 3 (October 1976): 246–266.
- Odom, William E. "American Hegemony: How to Use It, How to Lose It." *American Philosophical Society* Vol. 151, no. 4 (December 2007): 404–411.
- O'Neil, Patrick H. *Essentials of Comparative Politics*. 3rd ed. New York: W.W. Norton & Co, 2010.
- Pedahzu, Ami, and Arie Perliger. *Jewish Terrorism in Israel*. New York: Columbia University Press, 2009.
- Ranstorp, Magnus. "Terrorism in the Name of Religion." *Journal of International Affairs* Vol. 50, no. 1 (Summer 1996): 41–63.
- Rosyidin, Mohammad. *The Power of Ideas Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Sleman: Tiara Wacana, 2015.
- Satrianingsih, Andi, and Zaenal Abidin. "Sejarah Zionisme Dan Berdirinya Negara Israel." *Jurnal Adabiyah* Vol. 16, no. 2 (2016): 172–185.
- Saude. "Zionisme Dan Berdirinya Negara Israel." *Jurnal Hunafa* Vol. 3, no. 2 (June 2006): 169–180.
- Schmid, Alex Peter, ed. *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. New York: Routledge, 2011.
- Sellers, Brandon. "The Irgun Zvai Leumi: From Terrorists to Politicians." *Schemata* (2013): 1–13.
- Sen, Amartya. *Kekerasan Dan Identitas*. Translated by Arif Susanto. Edisi Kedua. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016.
- Shamir, Jacob. *Public Opinion in Israeli-Palestinian Conflict*. 60. Washington, DC: The United States Institute of Peace, 2007.

- Sheheta, Sherif. "Threats of Modern Terrorist Organizations and State Sponsored Terrorism - The Case of Islamic State." *Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje*, no. 19 (2015): 216–233.
- Siniver, Asaf. "Israeli Identities and the Politics of Threat: A Constructivist Interpretation." *Ethnopolitics* Vol. 11, no. 1 (March 2012): 24–42.
- Studená, Markéta. "Israeli Decision Making Process in Counter-Terrorism Strategy." Bachelor Thesis, Masaryk University, 2012.
- Trapp, Kimberley N. "Holding States Responsible for Terrorism Before the International Court of Justice." *Journal of International Dispute Settlement* Vol. III, no. 2 (2012): 279–298.
- Wendt, Alexander. "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics." *International Organization* Vol. 46, no. 2 (Spring 1992): 391–425.
- . "Collective Identity Formation and the International State." *The American Political Science Review* Vol. 88, no. 2 (June 1994): 384–396.
- . *Social Theory of International Politics*. Cambridge Studies in International Relations 67. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 1999.
- Whittaker, David J., ed. *The Terrorism Reader*. 2nd ed. London ; New York: Routledge, 2003.
- Wilkinson, Paul. *Political Terrorism*. London: Macmillan Education UK, 1974.
- "Alexander Wendt | American Political Scientist and Educator." *Encyclopedia Britannica*. Accessed April 11, 2019. <https://www.britannica.com/biography/Alexander-Wendt>.
- "CNN.Com - 'You Are Either with Us or against Us' - November 6, 2001." Accessed March 24, 2019. <http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/>.
- "Count Folke Bernadotte." Accessed February 10, 2019. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/count-folke-bernadotte>.
- "Donald Trump Says His Controversial Decision to Recognise Jerusalem as Israel's Capital Was a 'Wonderful Thing.'" *The Independent*. Last modified March 5, 2018. Accessed March 30, 2019. <http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-israel-jerusalem-capital-benjamin-netanyahu-a8241036.html>.

Emergency Powers (Detention) Law, 5739-1979, 1979.
https://www.btselem.org/sites/default/files/1979_emergency_powers_law_detention_0.pdf.

Incarceration of Unlawful Combatants Law 5762-2002, 2002.
<https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/IncarcerationLaw.pdf>.

“Israel Was Soft on Jewish Terrorists in the 1980s - Will History Repeat Itself? - Israel News - Haaretz.Com.” Accessed February 21, 2019.
<https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-will-jewish-terrorists-get-soft-treatment-like-predecessors-1.5403110>.

Prevention of Terrorism Ordinance No 33 of 5708-1948, 1948.

“Prevention of Terrorism Ordinance No 33 of 5708-1948-.” Accessed May 4, 2019.
<https://mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1900-1949/pages/prevention%20of%20terrorism%20ordinance%20no%2033%20of%205708-19.aspx>.

“Shamir on Terrorism (1943).” Middle East Report 152, June 1988.

“Some Quotes from Prime Minister Menachem Begin, Who Sunday...” *UPI*. Accessed February 8, 2019.
<https://www.upi.com/Archives/1983/08/28/Some-quotes-from-Prime-Minister-Menachem-Begin-who-Sunday/1911430891200/>.

The Counter-Terrorism Law 5776-2016, 2016.
<https://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/InternationalLaw/MainDocs1/TheCounterTerrorismLaw.pdf>.

The Defence (Emergency) Regulations 1945, 1945.
https://www.imolin.org/doc/amlid/Israel/The_Defence_Emergency_Regulations_1945.pdf.

“The Seattle Times: Nation & World: ‘War on Terror’ Difficult to Define.” Last modified January 14, 2009. Accessed March 24, 2019.
https://web.archive.org/web/20090114085106/http://seattletimes.nwsources.com/html/nationworld/2002023596_russanal02.html.

UNSC Resolution No. 1267, 1999. https://www.sipri.org/sites/default/files/2016-03/UNSC_1267.pdf.